

4-30-2018

Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta

Fajar Erikha

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, fajar.erikha51@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

Recommended Citation

Erikha, Fajar. 2018. Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 8, no. 1 (April). 10.17510/paradigma.v8i1.231.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONSEP LANSKAP LINGUISTIK PADA PAPAN NAMA JALAN KERAJAAN (RÂJAMÂRGA): STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA

Fajar Erikha

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, fajar.erikha51@ui.ac.id

DOI: 10.17510/paradigma.v8i1.231

ABSTRACT

Linguistic landscape (LL) refers to a set of linguistic objects which signifies a public space (Ben-Rafael, Shohamy et al., 2006). This concept encompasses a number of topics such as social, political, cultural, and economic ones. Using the concept of LL, the author examined the names of the main streets (*râjamârga*) around the Yogyakarta Palace in terms of their function as the identifiers of place names (informational function) and as carriers of certain messages (symbolic function). In order to generate comprehensive results, the author used qualitative approach through the analysis of visual data (photographs) of street name plates. The findings reveal two functions of linguistic landscape which is established by street name plates. The first is informational function, namely to refer to geographical places and to the social space of the Javanese which are presented as a single ethnic group, while the orthographic use of *hanacaraka* asserts language boundary. The second is symbolic function, namely to convey a collection of meanings (according to the philosophy of Paraning Dumadi), to delineate Javanese as an ethnic group, to designate Javanese as the native language of the local people, to indicate a strong link between governmental powers and place naming practices, and even to serve economic purposes by attracting tourists to Yogyakarta.

KEYWORDS

Linguistic landscape, politics of language, street name plates, culture, Yogyakarta.

masyarakat Yogyakarta sendiri maupun masyarakat luar. Dalam penelitiannya, Erikha (2017) melakukan analisis atas 673 komentar anggota media sosial *Kaskus* terhadap pemicu berita yang berjudul “Ratusan nama jalan di Yogyakarta diubah demi filosofi sejarah”, menggunakan teori kelekatan toponimik milik Kostanski (2009). Hasilnya, terdapat kelekatan toponimik melalui empat kategori sikap terhadap isu perubahan nama jalan di Yogyakarta. Empat kategori sikap itu adalah sikap setuju atas restorasi nama jalan, sikap setuju bersyarat, sikap menolak, dan sikap irelevan. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa fenomena LL yang terlihat seperti hal kecil ternyata dapat berdampak luas.

Selain itu, pada medio 2017 ini, juga terdapat penelitian tentang bagaimana aspek sosio-onomastik (persepsi dan sikap masyarakat) terhadap pengubahan 600 nama jalan di Yogyakarta (Wuryandari et al. 2017). Berbeda dari dua penelitian di atas, peneliti ini tertarik untuk melihat isu yang terdapat di Yogyakarta dengan menggunakan pisau analisis lanskap linguistik.

1.2 Masalah Penelitian

Penelitian ini berangkat dari permasalahan penelitian, yaitu bagaimana lanskap linguistik menjelaskan papan nama jalan utama kerajaan (*râjamârga*) Keraton Yogyakarta. Dari masalah itu diajukanlah dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana gambaran situasi lanskap linguistik pada *râjamârga* di Keraton Yogyakarta?; dan 2) bagaimana pesan akan disampaikan oleh Keraton Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang atas lanskap itu?

1.3 Kerangka Teoretis

1.3.1 Lanskap linguistik

Lanskap linguistik atau *linguistic landscapes* (selanjutnya disebut LL) merupakan kehadiran bahasa di antara ruang dan tempat. Puzey (2016) menggambarkan LL sebagai kajian interdisipliner atas kehadiran berbagai isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik. Meskipun LL merupakan istilah yang relatif baru dalam kajian linguistik terapan, konsep ini telah bersinggungan dengan konsep lain, seperti sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya, semiotik, sastra, pendidikan, dan psikologi sosial. Melalui interaksi bahasa di ruang publik, kita dapat menelusuri konstruksi simbolis sebuah ruang dan penggunaan bahasa dalam memediasi relasi sosial dan politik. Ini diperkuat dengan pernyataan Ben-Rafael et al. (2006, 7) bahwa *LL refers to linguistic objects that mark the public space*.

Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL memiliki dua fungsi: fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis. Blommaert (2013) menyebut ruang sebagai arena interaksi sosial manusia dan melakukan serangkaian kegiatan budaya. Ruang interaksi itu dapat dinilai sebagai bentuk aksi/tindak tanduk bahwa ruang sebagai sesuatu yang kompleks dan berisi berlapis-lapis aktivitas di dalamnya. Dengan demikian, bukti yang ditampilkan dalam kajian LL ini menjadi pola komunikasi manusia yang diwakilkan melalui bahasa tulis.

1.3.2 Nama sebagai Tanda di Ruang Publik

Berbagai tanda di ruang publik merefleksikan dan mengatur tatanan ruang tempat ia beroperasi. Fitur sosiologis, kultural, sosiolinguistik, dan politis dari ruang akan menentukan bagaimana tanda terlihat dan bekerja, dan tanda juga akan berperan dalam organisasi dan regulasi keruangan dengan menetapkan siapa saja penerima tanda itu. Tanda di ruang publik juga dapat memaksa audiensi agar mengikuti aturan mainnya, dengan sejumlah batasan dan pedoman norma yang dianut bersama (Blommaert 2013). Tanda dalam ruang publik tentunya dibuat bukan tanpa alasan. Tanda memiliki pesan dan tidak pernah netral, memiliki keterhubungan dengan struktur sosial, hierarki, dan kekuasaan (Stroud dan Mpendukana 2009). Alasannya, ruang publik merupakan area sekaligus juga instrumen pengaturan dan pengendalian kekuasaan.

Sebuah ruang publik tentunya berbeda dari ruang privat, misalnya ruang tamu di rumah kita. Bertolak belakang dengan ruang privat, ruang publik pada dasarnya ruang berbagi pada orang seorang atau kelompok yang mungkin diinginkan oleh pihak yang berwenang (contoh: pemerintah). Biasanya, pemilik objeklah yang berhak mengatur penggunaannya (Blommaert 2013).

Nama jalan merupakan pesan berisi komunikasi antara pembuat pesan dan penerima. Dalam konteks kasus Yogyakarta, pesan komunikasi disampaikan oleh Keraton Yogyakarta melalui aturan Pemerintah Kota. Blommaert (2013) menyebutkan komunikasi di ruang publik tidak lepas dari komunikasi pada ranah kuasa dan bersifat sosiolinguistik. Misalnya, pada nama lama jalan Margo Mulyo, Jalan Jenderal Ahmad Yani (biasa disingkat Jalan Ahmad Yani) sangat umum menjadi nama jalan-jalan utama di daerah di Indonesia. Nama itu sangat populer pada rezim Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto) dan ketika berakhir rezimnya pada 1998, dapat dimaklumi bahwa terjadi pergantian nama jalan, sesuai dengan pertanyaan Bloomert (2013, 40) "*how does space organize semiotic regimes of language?*" Tentu saja semua tanda yang diungkapkan melalui papan jalan menjalankan praktik wacana dengan atribusi kepada sebuah ideologi (Blackwood dan Tufi 2015).

Berbicara tentang tanda tentu tak lepas dari isu semiotik. Papan nama yang berada di jalanan (lanskap) merupakan penanda sebuah ruang. Sebuah teori klasik milik Ogden dan Richards (1923) telah menyinggung bagaimana sebuah konsep (referensi) yang mewakili objek (referen) diwakilkan oleh lambang (simbol bahasa). Itu berkaitan dengan peran papan nama, misalnya Jalan Jenderal Sudirman (di Jakarta) sebagai toponimi merupakan lambang bahasa atas objek jalan yang membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga penanda Patung Pemuda Membangun (dikenal juga dengan Patung Bundaran Senayan). Bagi masyarakat Jakarta, jalan itu memiliki konsep yang sangat bervariasi di dalam benak mereka. Baik itu sebagai konsep jalan ibu kota, jalanan yang padat, maupun sebagai jalan dengan banyak gedung pencakar langit.

Konsep tersebut memperlihatkan bagaimana semiotik berperan dalam LL serta mencoba menangkap bahasa sebagai perantara antara ruang dan tempat. Eksistensi nama jalan juga dapat ditelaah menggunakan perspektif analisis wacana yang kemudian disebut konsep geosemiotik. Geosemiotik merupakan kajian pemaknaan sosial atas penempatan material tanda-tanda, muatan wacananya, serta sikap kita terhadap dunia material itu. Konsep itu berawal dari pewacanaan terdahulu atas kehadiran ruang fisik sebagai latar semata, tetapi saat ini telah dievaluasi kembali sehingga menjadi bagian dari teks itu sendiri (Scollon dan Scollon 2003)

1.3.3 LL dan onomastik

Kajian onomastik (ihwal nama dan penamaan), khususnya toponomastik (nama tempat), menjadi bidang yang tak terlepas dari LL. Nama atau papan nama yang ada di jalanan, yang notabene bagian dari

lanskap, dianggap bentuk interaksi antara bahasa, ruang dan tempat. Kerangka konsep LL dan fokusnya pada nama tempat, juga berkaitan erat dengan keadaan *vis a vis* antara bahasa minoritas dan mayoritas (Gartor, Mensel, dan Marten 2012) serta pemberlakuan upaya politik terhadap bahasa lokal dalam rangka perubahan nama tempat serta bagaimana sikap masyarakat terhadap isu itu (Kostanski 2009). Singkat kata, terdapat hubungan antara LL, nama-nama dan kebijakan bahasa yang tertuang dalam sejumlah isu seperti dinamika pemajanan papan nama dengan bahasa ganda (atau lebih), konflik yang dipicu, penamaan ulang, hingga bahasa sebagai identitas sebuah kelompok (Puzey 2016).

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan repertoar visual atau data foto dari empat papan jalan yang terdapat di sepanjang *râjamârga*: Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi), Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani), dan Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora). Semua diambil oleh penulis ini kecuali foto pada Jalan Malioboro. Karena alasan teknis, digunakan foto dari sumber internet. Penggunaan foto menjadi sangat signifikan di dalam penelitian LL karena dapat menangkap isu bahasa yang terdapat di dalam tempat-ruang, dan sangat mudah digunakan melalui kamera saku yang terhubung dengan telepon genggam (Puzey 2016). Sebagai data pendukung, penulis ini juga menyertakan sejumlah foto nama jalan baru sebagai respon masyarakat melalui pembuatan papan reklame toko atau kantor yang mencantumkan nama jalan. Foto pendukung ini juga menjadi varian nama jalan yang dianggap resmi oleh pemerintah dan yang tidak. Semua foto ini akan dianalisis menggunakan dua fungsi papan jalan sebagai objek LL, seperti yang dijelaskan oleh Landry dan Bourhuis (1997): fungsi informasional dengan mengkaji papan jalan dari aspek kebahasaannya; sedangkan fungsi simbolis yang melihat bahasa dan interaksinya. Fungsi simbolis data menggali pesan dasar dari fakta LL dan hierarki suatu bahasa atas bahasa lain dan menjelaskan juga bagaimana sebuah lanskap dibangun.

2. Analisis

2.1 Jalan Margo Utomo (d.h Jalan Pangeran Mangkubumi)



Gambar 1. Jalan Margo Utomo dilengkapi dengan penulisan aksara hanacaraka (Foto: Fajar Erikha).

Jalan Margo Utomo diubah dari Jalan Pangeran Mangkubumi sejak 2013. Jalan ini terletak di sepanjang jalan dari rel Stasiun Tugu/Stasiun Yogyakarta hingga Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Gilig. Jalan ini merupakan salah satu dari empat jalan utama kerajaan atau *râjamârga* (Darmosugito 1956; Carey, Noorduyn, dan Ricklefs 2015) karena menjadi jalan utama bagi tamu-tamu kerajaan yang akan memasuki Keraton. Jalan ini ditulis dengan dua aksara: latin dan hanacaraka. Penulisan aksara hanacaraka pada papan jalan pada dasarnya bertujuan melestarikan bahasa Jawa. Selain di Yogyakarta,² penulisan papan jalan dengan aksara ganda juga dilakukan di Solo,³ Bandung,⁴ dan Bali.⁵ Secara fungsional informasi, menurut Landry dan Bourhis (1997), penulisan aksara hanacaraka memiliki konten bahasa yang sama dengan penulisan aksara latin. Hanya masyarakat atau individu yang memiliki kompetensi bahasa hanacaraka lisan-tulis saja yang mampu membaca tulisan itu.

Dari segi fungsi simbolis, aksara hanacaraka mengindikasikan atribut etnik Jawa dan merupakan elemen yang hidup subur di Yogyakarta. Identitas etnik menjadi simbol yang diartikulasikan melalui penyeragaman informasi nama jalan menggunakan aksara hanacaraka. Blommaert (2013) menyebutnya dengan terminologi repertoar visual. Ia mencontohkan kasus LL di London Chinatown yang banyak sekali papan jalan dan reklame dengan alfabet *cyrillic* dan hanya dapat dipahami, misalnya, oleh orang yang lahir dan besar di Hong Kong. Tentu saja hal sebaliknya akan terjadi jika yang masuk ke dalam tempat itu orang yang berasal dari Eropa Timur.



Gambar 2. Nama ganda sebagai fungsi informasional (Foto: Fajar Erikha).

Nama pada papan jalan sebagai proposisi budaya dapat dianalisis berdasarkan konteks semantik dan konteks pragmatik, atau meminjam istilah Rahyono (2015): analisis lingual dan analisis nonlingual. Pada aspek semantis, *Jalan*⁶ diartikan sebagai 'tempat seseorang atau sebuah objek untuk melintas dari satu tujuan ke tujuan tertentu', sedangkan *utomo* berarti 'yang paling tinggi, tertinggi, kepala, pokok, baku, paling baik, ulung, unggul, utama' (Zoetmulder 1995). Margo Utomo dapat diartikan sebagai 'jalan keutamaan'.

2 <https://travel.tempo.co/read/news/2017/05/12/204874712/papan-nama-jalan-di-yogyakarta-akan-tampil-antik-dan-khas> Diakses 6 September 2017 pada 9.50.

3 <https://news.okezone.com/read/2008/02/04/1/80815/solo-wajibkan-aksara-jawa-di-papan-nama> Diakses 6 September 2017 pada 09.52.

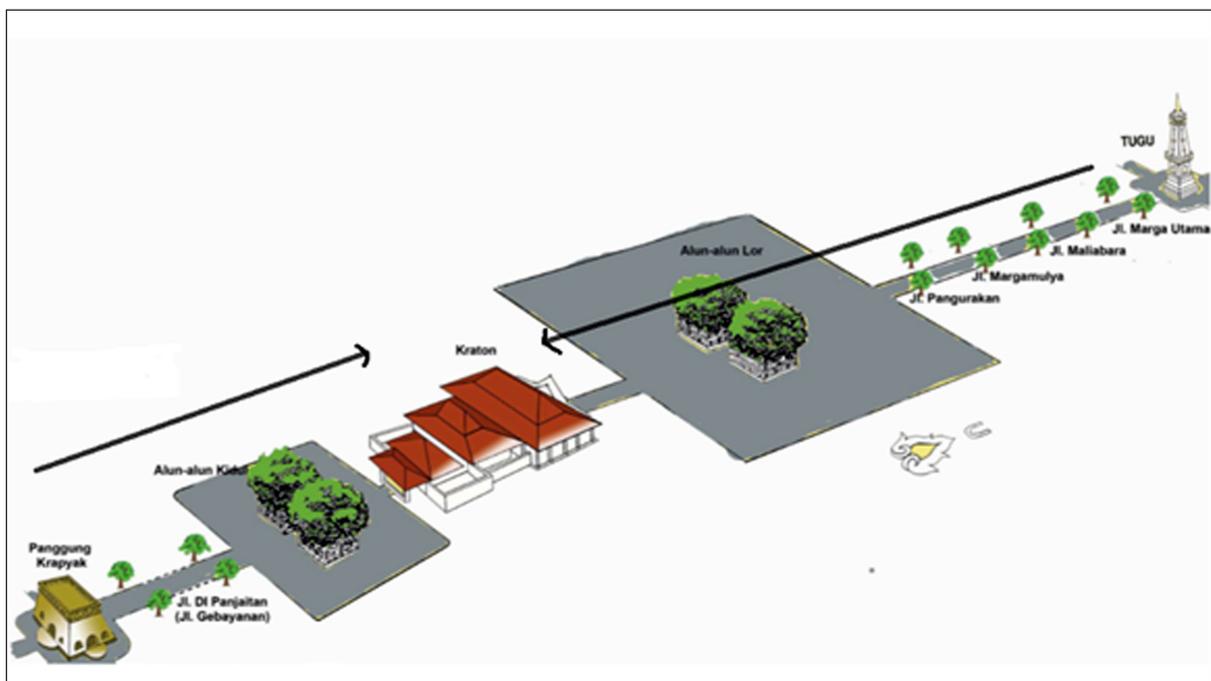
4 <http://nasional.kompas.com/read/2008/11/24/19503951/berita.foto.papan.jalan.aksara.sunda> Diakses 6 September 2017 pada 11.41.

5 <http://sastrabalimodern.blogspot.co.id/2012/03/aksara-bali-papan-nama.html> Diakses 6 September 2017 pada 11.42.

6 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan> Diakses pada 9 Mei 2017 pukul 06.31.

Priyono, Pratiwi, Tanudirjo, dan Suwito (2015) menyebut *Margautama* (Margo Utomo) secara etimologis berarti 'jalan' (*margilmêrgi*) dan *utama* yang berarti 'utama'.

Papan jalan juga memiliki fungsi simbolis (Landry dan Bourhis 1997). Margo Utomo merupakan simbol yang akan disampaikan oleh Keraton Yogyakarta kepada masyarakatnya melalui Filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* yang dibuat oleh Pangeran Mangkubumi, Raja Keraton Yogyakarta pertama, melalui tiga susunan: Panggung Krapyak-Keraton-Tugu Pal Putih. Filosofi itu terbagi menjadi dua: *Sangkaning Dumadi* (Keraton ke Panggung Krapyak) dan *Paraning Dumadi* (Tugu Pal Putih ke Keraton). Namun, dalam konteks penelitian ini, saya hanya berfokus pada filosofi *Paraning Dumadi* saja. Tugu Pal Putih dimaknai sebagai langkah pertama menuju ke alam keabadian dan melambangkan lingga (alat kelamin laki-laki) yang menghasilkan sperma, benih kehidupan sebagai awal pembentuk kehidupan (Priyono et al. 2015). Setelah itu, Jalan Margo Utomo menjadi tahap awal yang harus dilewati oleh manusia. Manusia diharapkan memahami keutamaan dan berjalan melalui nilai berbagai keutamaan dalam hidupnya. Itu sesuai dengan arah jalan yang menghadap ke selatan (ke arah Keraton).



Gambar 3. Ilustrasi filosofi *Sangkan Paraning Dumadi*. *Sangkaning Dumadi* pada panah kiri ke kanan dan *Paraning Dumadi* pada panah kanan ke kiri (Sumber: Buku Profil Yogyakarta City of Philosophy).

2.2 Jalan Malioboro

Jalan Malioboro terbentang dari rel kereta api (berbatasan dengan Jalan Margo Utomo) hingga perempatan Toko Batik Terang Bulan. Sebagai penanda visual, terdapat sejumlah objek yang berada di sepanjang jalan itu, seperti Hotel Garuda, Kantor DPRD, Apotek Kimia Farma, dan Kantor Kepatihan. Jalan itu merupakan wilayah populer dan telah dibahas oleh sejumlah tulisan, seperti etimologi atau asal-usul nama Malioboro yang berarti untaian bunga atau tasbih, yang dapat ditelisik melalui naskah *Râmâyana* (Carey, Noorduyn, dan Ricklefs 2015); perubahan linguistis dari *mergelburg* karena terdapat benteng yang terbuat dari batu kapur yang merujuk ke Benteng Vredenburg (Salazar 2010) dan juga bermakna jalan kemuliaan dalam hidup (Salamun 1988)

Pada fungsi informasional, papan jalan ini tentu menjadi penanda lanskap dan membedakannya dari ruas *râjamârga* yang saling berdekatan seperti Jalan Margo Utomo dan Jalan Margo Mulyo. Dengan

demikian, diharapkan tidak ada yang tersesat ketika berkegiatan ataupun berkunjung di suatu tempat di Jalan Malioboro. Meskipun demikian, penulis ini juga masih menemukan mislokasi pencantuman nama jalan pada papan toko, yang seharusnya ditulis Jalan Margo Mulyo, ditulis Jalan Malioboro. Artinya, temuan ini menunjukkan pelanggaran fungsi informasional dan inkonsisten dari penyampaian yang seharusnya.



Gambar 4. Papan Jalan Malioboro (Foto: <http://www.info-jogja.com/2014/07/pemkot-jogja-larang-pkl-berjualan-di.html>).

Sejak awal abad ke-20, Malioboro menjadi kawasan bisnis, tempat para pedagang mendirikan toko atau berjualan di pinggir jalan. Darnosugito (1956, 26) pernah membahasnya seperti kutipan di bawah ini.

Karena sebagai kebiasaan orang-orang yang hidupnya melulu berdagang, maka mereka sama berumah tangga di tepi jalan, dengan toko-tokonya yang berisi bermacam-macam keperluan rumah tangga. Inipun merupakan salah satu faktor yang banyak membantu meramaikan Malioboro.

Pernyataan itu dapat dikaitkan dengan upaya revitalisasi kawasan menjadi salah satu tempat pariwisata. Leeman dan Modan (2010) telah membahas hal ini dalam konteks LL dan menyatakan bahwa diseminasi simbol-simbol etnisitas dan budaya nasional dapat menarik turis serta dapat menjadi strategi pemerintah kota. Leeman dan Modan mencontohkan bagaimana kelompok etnis minoritas menjadi target pemasaran pariwisata. Berbeda dari konteks Yogyakarta, bahasa dan aksara Jawa yang notabene merupakan etnik mayoritas dijadikan penarik pariwisata.

Berdasarkan filosofi *Paraning Dumadi*, jalur tersebut merupakan jalan kedua setelah manusia melewati Jalan Margo Utomo. Filosofi ini menyebutkan bahwa Malioboro (varian lain *Maliabara*) berarti imbauan agar manusia menjadi wali yang mengembara, sebagaimana seorang wali agama yang berjalan mengembara demi menyebarkan agama dan kebaikan bagi umat manusia (Priyono et al. 2015). Hal itu menjadi penjelas fungsi simbolis sebuah LL menurut Landry dan Bourhis (1997). Fungsi-fungsi simbolis bahasa juga berperan dalam konstruksi sebuah tempat ataupun ruang sosial (Shomamy dan Waksman 2009). Makna Malioboro

merupakan konstruksi Keraton atas budaya yang telah dibangun dan diartikulasikan. Dengan kata lain, "kehadiran" Keraton sebagai pihak yang memiliki kuasa dan harapan yang besar atas masyarakatnya melalui pemaknaan atas nama jalan itu. Simbol itu diperkuat dengan arah jalan lurus ini ke arah selatan menuju Keraton, tempat Sri Sultan Hamengku Buwono X bertakhta.



Gambar 5. Jalan Malioboro justru ditaruh di ruas Jalan Margo Mulyo (Foto: Fajar Erikha).

1.3 Jalan Margo Mulyo (d.h Jalan Ahmad Yani)



Gambar 6. Papan Jalan Margo Mulyo (Foto: koleksi pribadi).

Jalan Margo Mulyo merupakan nama baru yang disematkan menggantikan nama terdahulu, Jalan Ahmad Yani. Penggantian itu diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan Raja Keraton Yogyakarta. Secara geografis jalan itu terbentang dari titik nol selatan (keraton), yang ditandai dengan Istana Kepresidenan, berhadap-hadapan dengan Benteng Vredebrug. Pasar Beringharjo yang juga terletak pada bagian jalan itu. Selain itu, penanda representatif lain adalah Gereja klasik bernama Gereja Margo Mulyo yang dibangun pada 1830. Jalan Margo Mulyo menjadi tahap ketiga yang harus dilewati manusia.

Dalam aspek semantis, Margo Mulyo berasal dari bahasa Jawa yang masing-masing berarti 'jalan' dan 'mulia' atau 'kemuliaan' (Zoetmulder 1995). Penamaan itu berkaitan dengan fungsi serta makna simbolis yang dimuatnya, yaitu tahap manusia yang menemukan keutamaan hidup, mengajarkan kebaikan menurut ajaran wali sehingga akan memperoleh jalan kemuliaan (Priyono et al. 2015). Dalam filosofi *Paraning Dumadi*, terdapat penjelasan bahwa Marga Mulyo merupakan tahap terakhir perjalanan seorang manusia yang berhadapan dengan sejumlah godaan duniawi, seperti kekayaan (disimbolkan melalui aspek ekonomi di Pasar Beringharjo) dan wanita. Jika berhasil melalui serangkaian godaan duniawi itu, manusia akan memperoleh kehidupan yang kekal.

Ben-Rafael (2009) menekankan bahwa LL menjadi penguat bahwa papan jalan dapat membawa aspek sosio-simbolis yang penting sebagai penanda masyarakat. Fungsi simbolis itu juga dapat melekat pada masyarakat atau individu yang melihatnya, dan menjadikannya pengalaman personal yang membedakannya dari pengalaman melihat papan jalan di tempat lain.



Gambar 7. Nama ganda sebagai fungsi informasional (Foto: Fajar Erikha).



Gambar 8. Kartu nama toko dengan penjelasan tiga nama jalan dengan fungsi informasional (Foto: Fajar Erikha).

2.4 Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora)



Gambar 9. Penulisan nama ganda beraksara ganda sebagai upaya transisi (Foto:Fajar Erikha).

Jalan Pangurakan (d.h Jalan Trikora) berukuran jalan pendek dan membentang dari pintu depan Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta hingga lampu merah Jalan Margo Mulyo. Pada zaman penjajahan Belanda, jalan itu bernama *Kadasterstraat* (Gupta, Handayani, Harnoko dan Yuliani 2014) Jalan yang dimulai dari titik nol kilometer itu dapat ditandai dengan keberadaan sejumlah bangunan, seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Pos Besar, dan Museum Sono Budoyo. Nama lama yang disematkan pada Jalan Pangurakan, yaitu Jalan Trikora. Penulis ini menduga bahwa nama Trikora diberikan sebagai nama peringatan (*commemorative name*) deklarasi Operasi Tri Komando Rakyat (disingkat menjadi Trikora) pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Soekarno, di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Namun, sejak 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta mengembalikan nama jalan itu ke nama aslinya, yaitu Jalan Pangurakan.

Penggunaan nama jalan dengan aksara hanacaraka mencerminkan bahwa terdapat wilayah penggunaan bahasa Jawa di Yogyakarta. Aksara hanacaraka digunakan setelah aksara latin yang berukuran sedikit lebih besar. Landry dan Bourhis (1997) menyebutkan bahwa papan jalan dengan unsur ekabahasa, dwibahasa, atau multibahasa merupakan gambaran keberagaman kelompok bahasa di wilayah itu. Sebagai fungsi informasional, papan jalan itu menjadi pemberi tahu bahwa Pangurakan merupakan wilayah Keraton Yogyakarta, berada di depan Alun-alun Lor.

PETER	TITLE	DAY	DATE	PUPP
Purman	The Death of Rahwana	Thursday	17 August '17	

Gambar 10. Pemakaian nama ganda sebagai fungsi informasional (Foto: Fajar Erikha).

Pada fungsi simbolis, papan itu berfungsi sebagai ejawantah identitas Jawa yang menjadi kelompok dominan di Yogyakarta. Sebagai bahasa yang paling dominan dan dikategorikan bahasa edukasional oleh Ethnologue⁷, bahasa dan aksara Jawa menjadi simbol kekuatan atau vitalitas kelompok Jawa (sebagai pihak yang dominan), khususnya yang tinggal di Kota Yogyakarta. Negro (2008) juga mengemukakan bahwa pemberian nama pada nama tempat menjadi ekspresi yang kasat mata pihak yang berkuasa. Landry dan Bourhis juga menyatakan bahwa papan jalan dengan bahasa milik kelompok yang dominan mengartikan bahwa kelompok itu telah mengendalikan area penting, seperti ekonomi, media massa; dan fungsi lain, seperti kesehatan, pertahanan, dan administrasi publik. Dominasi itu telah dilegitimasi dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta (Yudoyono 2017).

Menurut Priyono, Pratiwi, Tanudirjo, dan Suwito (2015), *Pangurakan* mengandung makna 'menolak, membuang, atau mengusir'. Singkatnya, secara filosofis jalan itu dianalogikan dengan tahap kehidupan manusia yang mulai melepas segala keburukan dan hawa nafsunya. Pangurakan sebagai gerbang pembuka

7 <https://www.ethnologue.com/language/jav> Diakses 3 September 2017 pada pukul 21.14.

juga dijelaskan kembali oleh Gericku dan Roorda, “*the place where the means of transport for the service of the ruler had to be brought*”. Itu sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam *Kamus Jawa Kuna Indonesia* (Zoetmulder 1995), yaitu sebagai lapangan persegi dan merupakan pintu gerbang di sebelah utara (Alun-alun) utara.

Papan jalan sebagai sebuah tanda menjadi perangkat yang memiliki dimensi historis. Terdapat hubungan antara tanda dan ruang-ruang tertentu (Blommaert 2013). Blommaert lebih lanjut menyebutkan bahwa terdapat harapan normatif yang dikandung hubungan antara ruang dan norma yang ingin mengartikulasikan aspek historisnya. Keinginan Keraton Yogyakarta yang diwakili oleh Pemerintah Kota telah mewujudkan harapan normatif itu. Pada saat nama jalan itu direstorasi, artinya jalan atau kawasan itu dahulu bernama Pangurakan. Jika ditelisik lebih mendalam lagi, di jalan itu terdapat tiga gapura: Gapura Gladhag, Gapura Pangurakan Jawi, dan Gapura Pangurakan Nglêbêt. Namun, saat ini Gapura Gladhag sudah tidak ada.

3. Kesimpulan

Situasi LL di jalan-jalan utama kerajaan (râjamârga) di Kota Yogyakarta menunjukkan dua fungsinya: fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, papan jalan berfungsi sebagai penanda tempat dan ruang. Papan nama juga menunjukkan fakta linguistik yang terdapat dalam sebuah lanskap. Sebuah Lanskap berkaitan dengan batasan geografi ataupun ragam etnis yang mendiami ataupun mendominasinya. Nama-nama dengan bahasa Jawa mendominasi di empat papan jalan itu: Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, dan Pangurakan. Informasi nama jalan juga dilengkapi dengan aksara kedua, yaitu hanacaraka. Pada sebagian temuan, papan jalan juga disertai dengan nama ganda dan bersifat transisional. Secara simbolis, aksara kedua itu menegaskan bahwa area itu merupakan kawasan permukiman komunitas yang mewakili bahasa dan aksara yang ditampilkan di papan jalan. Artinya, papan jalan memiliki simbol identitas etnis yang kental dan juga mencerminkan kearifan lokal. Papan jalan itu merupakan rangkaian filosofi yang dibentuk oleh Keraton Yogyakarta: *Sangkan Paraning Dumadi* yang berarti daur hidup manusia. Itu ditunjukkan dengan makna yang dimuat dan dilekatkan dalam nama-nama jalan itu, serta dikemas dalam arah utara ke selatan (menuju ke Keraton). Studi LL menjawab papan jalan sebagai fakta linguistik tidak semata-mata sebuah tanda identifikasi tempat. Lebih daripada itu, papan jalan memuat wacana yang diciptakan oleh pihak dominan (dalam hal ini Keraton Yogyakarta) pada ruang sosialnya. Keraton juga menggunakan kewenangannya dengan ikhtiar melekatkan identitas kejawaan (dengan pemilihan bahasa Jawa) pada nama jalan dan dipertegas dengan pilihan aksara hanacaraka. Dalam pendekatan representasi sosial, keadaan itu sangat dimaklumi. Itu sesuai dengan hakikat studi LL: bahasa sebagai perantara antara tempat dan ruang. Tidak hanya itu, papan jalan sebagai bagian dari kebudayaan dan historisitas juga digunakan sebagai komoditas ekonomi yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat itu. Rupa yang unik dan berbeda dari tempat lain menjadi daya tarik wisatawan untuk menjadikan bukti LL sebagai bagian dari pengalaman personal yang tidak dijumpai pada tempat yang lain. Itu pun menjawab keterkaitan antara LL dan ekonomi.

Penelitian ini dapat menjadi awal bagi penelitian berancangan LL, khususnya dinamika lanskap dalam keadaan dwibahasa, tribahasa, atau lebih. Pengkajian semacam itu dapat mengungkap bagaimana politik bahasa dilaksanakan, bagaimana bahasa lokal berkompetisi dengan bahasa lain, bagaimana bahasa kelompok dominan berhadapan dengan kelompok minoritas. Berbagai riset LL juga dapat digunakan oleh aparat pemerintah untuk memetakan hegemoni antarkelompok sosial dan bahkan memetakan potensi konflik. Selain itu, sebagai pemerkuat data, diperlukan juga penelitian yang menggali dimanika persepsi dan

sikap masyarakat terhadap keadaan lanskap bahasa yang mereka hadapi. Hal lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam, yaitu keterkaitan antara LL dan aspek ekonomi.

Daftar Referensi

- Ben-Rafael, Eliezer. 2009. A Sociological Approach to the Study of Linguistic Landscapes. Dalam *Linguistic Landscape, Expanding the Scenery*, ed. Elana Shomamy dan Durk Gorter, 20–54. New York: Routledge.
- Ben-Rafael, Eliezer, Elana Shohamy, Muhammad Hasan Amara, dan Nira Trumper-Hecht. 2006. Linguistic Landscape as Symbolic Construction of the Public Space: The Case of Israel. *International Journal of Multilingualism* 3, no. 1 (April): 7–30.
- Blackwood, Robert J. dan Stefania Tufi. 2015. *The Linguistic Landscape of the Mediterranean: French and Italian Coastal Cities*. London: Palgrave Macmillan.
- Blommaert, Jan. 2013. *Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Ontario: Multilingual Matters.
- Carey, Peter, Jacobus Koos Noorduyn, dan M.C. Ricklefs. 2015. *Asal Usul Nama Yogyakarta dan Malioboro*, ed. Peter Carey. Depok: Komunitas Bambu.
- Darmosugito. 1956. *Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.
- Erikha, Fajar. 2017. Nama Jalan Baru versus Nama Jalan Lama di Kota Yogyakarta: Sebuah Penelusuran Toponomastik. *Seminar Internasional Leksikologi dan Leksikografi: Teknologi, Bahasa dan Budaya dalam Penelitian Leksikologi dan Leksikografi*. Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Gupta, Dharma, Titi Handayani, Darto Harnoko, dan Pratiwi Yuliani. 2014. *Toponim Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya.
- Kostanski, Laura. 2009. 'What's in a Name?': Place and Toponymic Attachment, Identity and Dependence : A Case Study of The Grampians (Gariwerd) National Park name restoration process. Thesis, University of Ballarat.
- Landry, Rodrigue, dan Richard Y. Bourhis. 1997. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology* 16, no. 1: 23–49.
- Leeman, Jennifer, and Gabriella Modan. 2010. Selling the City: Language Ethnicity and Commodified Space. Dalam *Landscape in the City*, ed. Elena Shomamy, Eliezer Ben-Rafael, dan Monica Barni, 182–198. Bristol: Multilingual Matters.
- Negro, Silvia Dal. 2008. Local Policy Modeling The Linguistic Landscape. Dalam *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, ed. Elana Shomamy dan Durk Gorter, 206–218. New York: Routledge.
- Ogden, Charles Kay, and Ivor Armstrong Richards. 1923. *The Meaning of Meaning*. 8th. New York: Harcourt, Brace & World.
- Priyono, Umar, Dian Lakshmi Pratiwi, Daud Aris Tanudirjo, dan Yuwono Sri Suwito. 2015. *Buku Profil Yogyakarta City of Philosophy*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Puzey, Guy. 2016. Linguistic Landscapes. Dalam *The Oxford Handbook of Names and Naming*, ed. Carole Hough, 476–496. Oxford: Oxford University Press.
- Puzey, Guy. 2016. Renaming as Counter-Hegemony: The Cases of Noreg and Padania. Dalam *Names and Naming: People, Places, Perceptions, and Power*, ed. Guy Puzey dan Laura Kostanski, 244–272. Bristol: Multilingual Matters.
- Rahyono, F.X. 2015. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Edisi ke-2. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

- Salamun. 1988. *Inventarisasi dan Dokumentasi Nama-nama Jalan di Daerah Kotamadya*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Salazar, Noel B. 2010. *Envisioning Eden: Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond*. New York: Berghahn Books.
- Scollon, Ron, dan Wong Suzie Scollon. 2003. *Discourse in Place. Language in the Matherial World*. Abingdon: Routledge.
- Shomamy, Elana dan Shoshi Waksman. 2009. Linguistic Landscape as an Ecological Arena: Modalities, Meanings, Negotiations, Education. Dalam *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, ed. Elena Shomamy dan Durk Gorter, 313–331. New York: Routledge.
- Stroud, C., dan S. Mpendukana. 2009. Towards a Material ethnography of Linguistic Landscape: Multilingualism, Mobility and Space in a South-African Township. *Journal of Sociolinguistics* 13, no. 3: 363–383.
- Wuryandari, Nurni W., Ninie Susanti, Andriyati Rahayu, dan Sri Munawarah. 2017. *Artikulasi Budaya Melalui Nama-nama Jalan di Kota Yogyakarta*. Laporan Kemajuan Hibah Klaster FIB UI. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Yudoyono, Bambang. 2017. *Jogja Memang Istimewa*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Zoetmulder, Petrus Josephus. 1995. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.